

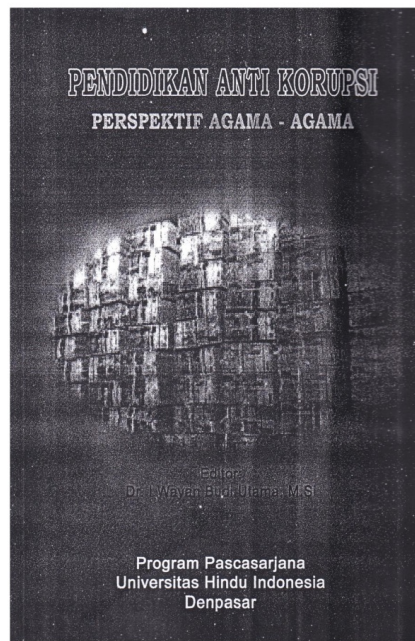


## Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: I Wayan Kandi Wijaya  
Assignment title: Economics and Business  
Submission title: Pendidikan Anti Korupsi:: Perspektif...  
File name: Pendidikan\_Anti\_Korupsi.pdf  
File size: 516.62K  
Page count: 22  
Word count: 3,331  
Character count: 22,219  
Submission date: 16-Nov-2020 07:31AM (UTC+0700)  
Submission ID: 1446978661



# Pendidikan Anti Korupsi:: Perspektif Agama-Agama

*by* I Wayan Kandi Wijaya

---

**Submission date:** 16-Nov-2020 07:31AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1446978661

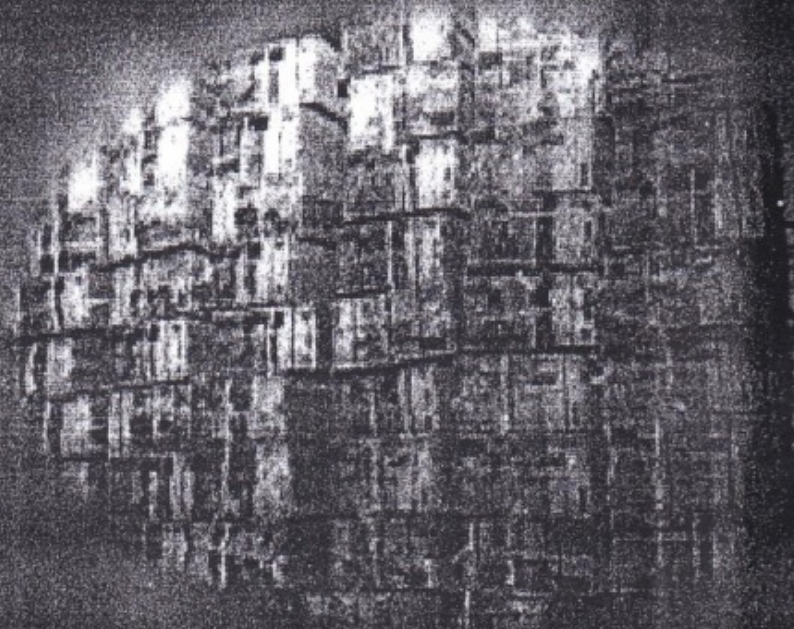
**File name:** Pendidikan\_Anti\_Korupsi.pdf (516.62K)

**Word count:** 3331

**Character count:** 22219

# PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

## PERSPEKTIF AGAMA - AGAMA



Editor:

Dr. I. Wayan Bughj Utama, M.S.

Program Pascasarjana  
Universitas Hindu Indonesia  
Denpasar

# **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA**

**Editor :**

**Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si**

**Penerbit**

**Program Pascasarjana  
Universitas Hindu Indonesia  
Denpasar**

**KATALOG DALAM TERBITAN  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA**

Denpasar, Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia  
xiii + 195 hlm; 15,0 x 20,5 cm

ISBN 978-602-14120-5-3

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA**

**EDITOR**

Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si

**Penerbit**

Program Pascasarjana  
Universitas Hindu Indonesia  
Denpasar

**Dicetak di**

PT. Percetakan Bali  
Jl. Gajah Mada I/1 Denpasar 80112  
Telp. (0361) 234723, 235221

## KATA PENGANTAR

Indonesia diakui dunia memmki kekayaan alam yang berlimpah sehingga sangat potensial untuk berkembang menjadi sebuah Negara yang sangat makmur. Jika kita membaca hasil penelitian Prof. Arysio Santos (2010) yang dipublikasikan dalam buku berjudul Atlantis The Lost Continent Finally Found, sebagai warga Negara Indonesia tentu kita harus bangga dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan di zaman es pun Indonesia telah menjadi pusat perkembangan peradaban yang sangat maju.

Sayangnya potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai kepada anak bangsa ini, dikarenakan semakin maraknya perilaku korupsi oieh para pengelola Negara. Korupsi telah merebak di hampir seluruh bidang kehidupan dan penyelenggara Negara baik eksekutif, legislatif, dan bahkan juga yudikatif sehingga memunculkan istilah triaskoruptika. Korupsi rupanya bukan lagi sekedar perbuatan melanggar hukum, namun sudah menjadi persoalan moral bangsa ini. Korupsi telah merusak~moral bangsa, sehingga harus dilakukan pembenahan sesegera mungkin terhadap moral bangsa ini. Bahkan dunia pengadilan pun (sebagai penjaga pintu penegakan keadilan) tidak luput dari tindakan korupsi.

## **HIGH COST ECONOMY, KORUPSI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN**

*Oleh : Dr. Wayan Kandi Wijaya, SE, AK, MM*

### **Abstrak**

Indonesia termasuk peringkat 100 dari 183an negara terkorup di Dunia, disamping negara-negara lainnya termasuk negara maju, dan peringkat 5 di Asia Tenggara pada tahun 2011. Penyebab utama dari terjadi korupsi adalah lemahnya penegakan hukum di negara ini disamping, adanya faktor lain seperti, Ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy), adanya lingkungan dan kesempatan (Environment and Opportunity), iklim tumbuhnya perilaku korupsi (Corruption Behavior) hingga budaya korupsi (Corruption Culture).

Sebagai solusi kontemporer dilakukan Indonesia adalah memberantas pelaku korupsi melalui pembentukan KPK untuk menangkapi kaum koruptor. Hasilnya belum mampu membrantas tindakan korupsi sampai keakar-akarnya. Dalam jangka panjang perlu dikembangkan model penanggulangan sedini mungkin dengan memberi pendidikan kepada masyarakat Indonesia, dengan Model Manajemen Pendidikan Anti korupsi, yang berbasis dan berorientasi pada Ekonomi kreatif, Nilai-nilai keprlbadian, Perilaku, Pendidikan moral keagamaan, sebagai salah satu tindakan pencegahan.

Kata kunci : Manajemen Pendidikan, High cost economy, opportunity, behavior, culture corruption, ekonomi kreatif.

## I. Pendahuluan

26

Korupsi sudah merajalela di negara manapun, baik negara maju negara berkembang, tidak ketinggian di Indonesia. Parah tidaknya korupsi di tiap tiap negara tersebut, perbedaanya terletak pada banyak sedikitnya intensitasnya serta kerugian ditimbulkannya. Tahun 2011 Indonesia termasuk peringkat 100 dari 183 negara terkorup di dunia, bahkan Indonesia termasuk diurutan nomor 5 terkorup di Asia Tenggara diatas Malaysia. Tahun 2012 turun menjadi urutan peringkat nomor 118 di Dunia.

Perilaku korupsi itu sendiri bukanlah hal yang sama sekali baru, Korupsi sendiri memiliki sejarah panjang di Indonesia, sudah ada di pemerintahan sejak awal kemerdekaan yang diproklamasikan pada 1945. Pada periode demokrasi liberal parlementer (1950-59) dan selama Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-65), korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan biasa dilakukan lewat aliansi di antara patron-patron politis dan klien-klien bisnis, yang secara reguler diberi perlakuan khusus dalam bentuk perizinan dan peluang-peluang bisnis yang tidak transparan.

Korupsi dilihat dari bahasa Inggris Corrupt arti dalam bahasa Indonesianya, berarti "busuk, mudah disuap". Terjemahan bebas Korupsi berkonotasi, mendapatkan sesuatu dengan cara tidak wajar (halal). Korupsi adalah sebuah konskensi politik, dimana didalamnya terdapat kekuasaan yang menjadi ladang bersemainya korupsi dilakukan. Gunadha (2012:1) menyatakan apabila tidak ditemukan dunia-kehidupan berlangsung dengan tertib dan nyaman, tanpa partisipasi politik. Menyitir dari pada itu,



Seyogyanya politik diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban, keteraturan, dan keseimbangan. Namun dalam pengamatan penulis, kekuasaan dari hasil politik disalah gunakan, melalui penyalahgunaan wewenang untuk melakukan hal-hal tidak benar, seperti melakukan korupsi.

Dalam korupsi terkandung makna, perbuatan melanggar hukum, merusak moral, bertentangan dengan prinsip demokrasi atas kepercayaan. Korupsi di Pengadilan tidak hanya merusak supremasi hukum atas idependesi kekuasaan kehakiman, tetapi bertentangan prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan atas kepercayaan, (Mulyadi, 2002), lebih lanjut, bahwa "tindakan pidana korupsi termasuk pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat (Romli Atmasasmita, 2004). Bila seseorang melakukan korupsi itu berarti melanggar moral dan hak-hak kehidupan suatu bangsa, secara realitas dapat merugikan negara dan masyarakat. Dalam memecahkan masalah korupsi perlu dilakukan tindakan preventif, tindakan hukum memberikan sanksi berat, hingga memberikan pendidikan kepada masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan serta wakil wakil rakyat, dengan mengembangkan model Manajemen pendidikan Anti Korupsi.

## **II. Pertanyaan Mendasar Terhadap Sebuah Tindakan Korupsi**

Dalam menelusuri sebuah korupsi, kita perlu mengajukan lima pertanyaan dasar ini What, Who, Whay, Where, When, agar menjadi jelas ujungnya dalam memahami korupsi yang sedang meraja lela di negara ini. What apa yang dikorupsi. Yang dikorup

adalah kekayaan negara dan masyarakat, kemudian who berarti siapa yang melakukan korupsi, jawaban adalah mencari orangnya yaitu setiap orang, termasuk penguasa dan pengusaha dan masyarakat. Why mengapa korupsi dilakukan, ini dilakukan adalah untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat dengan lebih cepat, lebih besar, untuk membiayai kehidupan yang tinggi. Where dimana dilakukan, di setiap tempat, kesempatan, waktu kapanpun. When, kapan saja jika ada kesempatan. Dengan melihat lima jawaban dari pertanyaan dasar terhadap korupsi, maka dapat dipahami korupsi itu dapat dilakukan oleh siapapun dia, dan kapanpun dan dimanapun pasti dilakukan orang-orang yang tidak bermoral atau koruptor.

### **III. Ciri-ciri Korupsi, Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahan**

#### **1. Ciri-ciri Korupsi dan masalah di Indonesia**

Korupsi memiliki ciri-ciri di antara adalah :

(a) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat

mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

### **Permasalahan korupsi di Indonesia**

Masalah korupsi menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya secara regional bahkan internasional. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan data Transparency International Indonesia, kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara pada tahun 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi akhir-akhir ini terjadi perebutan kewenangan antara KPK dan Polri. Sebagai institusi yang sama-sama menangani korupsi, seharusnya KPK dan Polri bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak terjadi jika dapat dikoordinasikan secara baik.

Secara umum yang menjadi penyebab terjadinya korupsipun bermacam-macam, antara lain masalah ekonomi, yaitu rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang konsumtif,

budaya memberi tips (uang pelicin), ekonomi biaya tinggi, budaya malu yang rendah, sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera, penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, dan kurangnya pengawasan hukum.

## **2. Faktor Penyebab utama terjadinya Korupsi**

Dari beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya dan atau dapat dilakukan tindakan korupsi, kita dapat melihat tindakan utama sebagai penyebab korupsi dilakukan adalah : 1) Ekonomi biaya tinggi, 2) Adanya lingkungan dan kesempatan, 3) Lemahnya peraturan hukum dalam memberikan sanksi, 4) Perilaku korup masyarakat, 5) Budaya korup masyarakat negara.

Ekonomi biaya tinggi atau lazim disebut dengan high cost economy, merupakan salah satu faktor pemicu utama orang melakukan tindakan korupsi. Hal ini dilakukan mengingat himpitan kehidupan terutama di kota-kota besar dengan nuansa gaya kehidupan yang kosumerisme cenderung mempengaruhi masyarakat umum dan pejabat negara. Faktor penyebabnya seperti adanya berlakunya beban bunga tinggi lembaga keuangan dan perbankan yang membawa biaya hidup menjadi tinggi, budaya konsumtif, gaya hidup mewah, tidak produktif, kesenangan menghipun kekayaan.

Dalam jangka pendek, persoalan high cost economy tampaknya masih akan menghantui negara ini. Indonesia terus dihadapkan pada masalah klasik berupa keterbatasan

infrastruktur, persoalan logistik, struktur pasar yang tidak efisien dan sulitnya memulai bisnis akibat persoalan birokrasi dan korupsi. Akibatnya, potensi negara ini untuk menggapai pertumbuhan yang tinggi dan menjadi kekuatan ekonomi regional yang berpengaruh terus terganggu oleh persoalan high cost economy dan lemahnya penegakan hukum.

Adanya kesempatan (opportunity) yang amat luas sehingga memberikan beberapa kemungkinan kesempatan melakukan korupsi untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah dalam waktu yang singkat. Kesempatan ini termasuk menjadi pejabat, berkuasa, mengambil keputusan strategis, hingga kedekatan kepada pengusaha atau penguasa lainnya.

Lemahnya peraturan perundang-undangan sebagai degradasi yuridis, yang akan cenderung memberikan ruang gerak koruptor untuk melakukan korupsi, karena korupsi yang dilakukan besar nilai kerugian negara diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan korupsi yang dilakukan seseorang, misalkan hukuman ringan sehingga tidak memerikan jera pelaku korupsi, karena memiliki kekayaan besar, dapat menyewa pengacara dengan mengorbankan bagian kecil hasil korupsi, dan kemungkinan dapat bebas dari jeratan hukum, disamping ada kong kalikong dengan aparat penegak hukum.

Adanya kondisi seperti itu justru memberikan iklim dan angin segar kepada seseorang untuk melakukan korupsi, dan cenderung ditiru oleh masyarakat, sehingga lama kelamaan dapat menjadi kebiasaan yang cenderung mejadi

semacam terciptanya kebiasaan baru sebagai perubahan perilaku (behavior) masyarakat luas. Perilaku masyarakat korupsi menjadi ancaman tatanan suatu masyarakat negara secara luas terjadi di suatu negara; menjadi cikal bakal sebagai suatu budaya korupsi (corruption culture).

Bila hal ini dilihat secara struktur maka tingkatan korupsi terendah hingga tertinggi dampak perubahannya menjadi, seperti mengambil model gambar untuk menjelaskan tingkat kebutuhan disampai Maslow.

**Tabel. 1. Model Hierarchy pertumbuhan Korupsi**

Hierarchy	Perkembangan	
I	High cost Economic	
II	Environment and opportunity	
III	Yuridis degradasi	
IV	Behavior	
V	Culture	

#### **IV. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Solusi Jangka Panjang**

Tindakan korupsi adalah tindakan jahat, tindakan tidak bermoral, merugikan negara dan masyarakat, perbuatan sangat busuk, yang walaupun demikian platform yang disandangnya, maka kerap kali setiap orang mau melakukan karena didukung oleh beberapa faktor yang disebut sebagai pemicu diatas, seperti dari adanya ekonomi biaya tinggi, menimbulkan perampasan dan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial

masyarakat, perbuatan melanggar hukum, penggunaan kekuasaan dan jabatan, adanya lingkungan dan kesempatan yang mendukung, hingga munculnya perubahan perilaku, sampai kepada Budaya sebuah korupsi dilakukan, merupakan hal yang menakutkan, Karena dapat menghancurkan tatanan sendi sendi kehidupan-berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu dilakukan tindakan penanggulangan baik secara preventif maupun secara persuasif dan aplikatif melalui pendidikan anti korupsi kepada masyarakat luas.

Secara preventif dimulai dari, penanggulangan HCE, dengan mengembangkan pendidikan berbasis ekonomi kreatif. Lingkungan dan kesempatan dengan cara menutup celah celah kesempatan berbuat terjadinya korupsi'dengan aturan aturan, waktu, pengawasan. Pembuktian pelanggaran korupsi, dengan mengusut, melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pengambilan tindakan hukum dan pemberian sanksi hukum dan moral. Perubahan perilaku masyarakat pejabat, dipantau atasan, peneguran dan penindakan secara hukum, jika sampai pada budaya korupsi meraja lela di masyaralfat, kesemua ini diperlukan mengambil tindakan moral, berhentikan dari jabatan, membayar dengan tindakan moral seperti di negara barat, seperti seorang koruptor, menjadi tukang sapu, pembersih wc, nyapu di jalanan di kantor dinasnya selama 2 tahun. Model Manajemen Pendidikan Anti Korupsi yang perlu dirancang untuk penanggulanganya adalah :

## **1. Pendidikan berorientasi pada Budaya kreatif dengan aplikasi ekonomi kreatif**

Menyitir dari apa yang disampaikan Prof. IB. Yudha Triguna dalam bukunya Strategi Hindu (2011: 5), bahwasanya pendidikan yang baik seharusnya mampu membangun kesadaran budaya yang kreatif. Budaya dalam konteks mencakup keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil perilaku yang dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat. Budaya kreatif mengajarkan kepada anak didik tidak hanya cerdas dalam aspek kognitif, tetapi juga emosional, spiritual dan sosial. Dalam konteks budaya timur (terlebih di Bali) aspek ini sangat menentukan nilai hidup seseorang.

Lebih lanjut Dr. Maulel (2010: 218), dalam buku Menggerakkan Ekonomi Kreatif menguraikan, bahwa budaya kreatif akan dapat menghasilkan ekonomi kreatif. Menurutnya mengambil definisi John Hawkins (2001) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Munculnya ekonomi kreatif sebagai akibat gagalnya ekonomi berbasis sumber daya beradaptasi dengan berbagai lingkungan, kemudian mendorong paradigma ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Maulel Moelyono, 2010 : 95). Ekonomi kreatif pada akhirnya dapat menunjang kehidupan yang lebih baik, karena meningkatnya pendapatan seseorang, perusahaan, dan pada akhirnya diharapkan hal ini menjadi tindakan dalam mencegah tidak dilakukan tindakan korupsi.



Dalam hubungannya antara korupsi dengan budaya, kita mengajukan sebuah pertanyaan Apakah korupsi telah menjadi budaya?, jawabannya pasti akan bervariasi tergantung apa yang dimaksud dengan budaya serta kekuatan ikatannya"dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat. Moh Hatta pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi, namun bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi atau suatu perbuatan yang kemudian dalam masa modern disebut korupsi.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, korupsi bukan hal yang baru kita dengar, ini mencerminkan mentalitas serta karakter kita yang disebabkan oleh banyak faktor. Korupsi secara historis merupakan konsep dan perilaku menyimpang secara hukum, ketika secara sosial, budaya dan politik telah terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik, yang diikuti dengan perasaan berhak atas keistimewaan, maka terdapat kecenderungan untuk melihat bahwa pemanfaatan berbagai sumber daya yang kita miliki baik finansial dan non finansial tanpa sepengetahuan publik untuk berbagai kepentingan secara tidak wajar.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan kunci kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukum yang keras, melimpahnya sumber yang kita miliki dan keadaan sosial budaya masyarakat. Perlu disadari adalah menghilangkan

penyebab secara sebagian akan sulit untuk menjamin korupsi akan hilang, paling tidak hanya mengurangi tingkat merajalelanya dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Korupsi dilihat dalam sudut pandang sosial dan budaya akan bervariasi tergantung dari batasan apa yang dimaksud dengan sosial budaya serta kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat. Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi. Dalam periode awal pada setiap daerah/bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial. Sosial dan budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan guna mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan/merusak kehidupan sosial masyarakat merupakan, menjadi instrumen penting untuk menenangkan dan memperkuat posisi kehidupan manusia, Namun demikian, hal yang jelas adalah bahwa korupsi yang terjadi dalam level manapun merupakan hal yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika serta norma sosial budaya dan nilai agama, sehingga dapat menjadi perilaku yang dapat menurunkan nilai-nilai budaya masyarakat ini.

Jika pun benar ada budaya korupsi, maka itu sebenarnya terjadi karena korupsi budaya akibat makin lemahnya kontrol sosial/pengawasan terhadap upaya mementingkan pribadi di atas kepentingan publik pada saat mereka mempunyai kedudukan/jabatan atas mandat publik baik langsung maupun tak langsung. Pembelajaran melalui pemberian pendidikan yang berorientasi budaya kreatif, untuk menghasilkan ekonomi kreatif amatlah penting untuk

diberikan, mengingat hal ini menjadi sebuah instrument untuk menanggulangi praktik korupsi.

**2. Pendidikan berorientasi pada Nilai Nilai Kepribadian/ kehidupan,** hasil dari proses pendidikan akan menimbulkan perubahan baru. Renald Kasali, (2006 : 271), menyatakan bahwa setiap perubahan selalu membawa nilai-nilai baru. Selanjutnya dia menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari subkultur yang memiliki ikatan emosional, sebagai kelompok kerja, bisnis, profesi, fungsional, asal kedekatan. Nilai-nilai positif itu disatukan kemudian ditularkan, kepada kelompok lain, sehingga dapat merubah nilai-nilai negatif yang dimiliki seseorang menjadi positif, sebagai nilai dasar kepribadian yang mutlak dimiliki masyarakat.

**3. Pendidikan beorientasi pada Perilaku**

Korupsi termasuk perbuatan jahat, (pidana) ini berarti termasuk melakukan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan perilaku normal, melanggar etika dan susila. Jelas jelas hal tersebut dimuat dalam Bhagavadgita. "Perbuatan yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kehendak adalah perbuatan penuh dosa, nampak tersirat dalam Sloka 3.37. (Wahai Arjuna, hanya hawa nafsu saja, yang dilahirkan dari hubungan dengan sifat nafsu material dan kemudian diubah menjadi amarah, yang menjadi musuh duna ini. Musuh itu penuh dosa dan menelan segala sesuatu)....., Korupsi adalah suatu Suntan untuk memperoleh uang untuk memenuhi hawa jika hawa nafsu ini tidak

terpenuhi kemudian marah, dan amarah itu merupakan sifat bodoh yang dapat merosotkan moral yang dimiliki manusia, sehingga Korupsi menjadi musuh dunia, musuh semua orang. Agar dapat terhindar dari sifat-sifat itu, perlu dimasukan pendidikan berorientasi pada perilaku sebagai pendidikan anti korupsi.

Perilaku korupsi adalah masalah yang sangat aktual saat ini, tiada hari tanpa pemberitaan di media massa Indonesia, baik cetak maupun elektronik, tentang perilaku korupsi, baik korupsi yang dilakukan oleh kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; dari tingkat pegawai rendah sampai pejabat tinggi, negara, pihak swasta apakah yang dilakukan di daerah ataupun di pusat. Terungkapnya berbagai kasus korupsi di Indonesia menunjukkan betapa parahnya perilaku korupsi, khususnya yang terjadi di jajaran birokrasi dan aparat pemerintah. Dapat dikatakan korupsi sudah begitu merajalela dan dilakukan oleh begitu banyak orang, sehingga perilaku korupsi seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Hal ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran nilai moral dalam masyarakat yang ditunjukkan perubahan perilaku yang tidak baik komponen bangsa ini. Terungkap data di beberapa sumber, terdapat 500 pimpinan daerah terlibat kasus korupsi.

- 4. Pendidikan yang mengandung pendidikan Moral Keagamaan** seperti : Etika/susila, Trikaya Parisudha, Panca' Sradha, Tat Twan Asi, Sadripu, Karmaphala sampai kepada

Moksa. Ajaran ajaran agama hindu ini sangat tepat dan baik untuk diberikan karena dapat memberikan pendidikan moral, bagi setiap insane masyarakat. Seperti misalnya di dalam ajaran Tri Kaya Parisuda, sudah mengandung ajaran bagaimana berpikir, berkata dan berbuat yang baik, patut dipahami maknanya. Suhardana (2008 : 132), menyatakan semua pemimpin diharapkan selalu berpikir yang baik (manacika), berkata yang baik (wacika), dan berbuat yang baik (kayika). Dalam Panca sradha, salah satu kita harus percaya adanya hasil dari perbuatan, jika kita korupsi, karena perbuatan korupsi adalah jahat tidak baik maka hasil diperoleh tidak baik. Dan demikian moksa, jika melakukan korupsi memperoleh hasil jutaan, milyar dan, tentu hasil itu tidak dapat dibawa serta mefla kedunia akhirat, yang dibawa hanyauah hasil karma seseorang. (Sudharta, 2001), lebih lanjut pentingnya memelihara kepercayaan akan nilai nilai dari ajaran-ajaran agama hindu sebagai penuntun perjalanan hidup. Dalam pada itu kepercayaan adalah nilai-nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia dan merupakan konsep yang kurang dimengerti, sehingga perlu ditanamkan. (Wibowo, 2011 : 513).

Dalam upaya mendekatkan unsur pendidikan dengan aspek managerial maka, Husaini Usman (2010), dalam bukunya Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan menyatakan bahwa substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau yang disebut fungsi manajemen adalah :

- (1) Perencanaan
- (2) Pengorganisasian
- (3) Pengarahan (motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, negosiasi, majemen konflik, perubahan organisasi, ketrampilan personel, membangun kepercayaan, penilaian kinerja, dan kepuasan kerja,
- (4) Pengendalian meliputi pemantauan (monitoring), penilaian, dan pelaporan.

(Husaini Usman, 2001:15)

Model Manajemen Pendidikan Anti Korupsi yang dapat diterapkan meliputi :

1. Merumuskan Misi, Visi, sasaran dan Tujuan,
2. Perencanaan Materi dan waktu dan anggaran
3. Membentuk organisasi Pelaksanaan
4. Melaksanakan dengan menggerakkan semua komponen pendukung
5. Mengawasi dengan monev

Model ini perlu lebih dikongkritkan untuk dapat direalisasikan dan diaplikasikan dalam tatanan pelaksanaan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran dari pendidikan anti korupsi.

## **V. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Korupsi sebagai perbuatan busuk, tidak wajar dilakukan semua komponen masyarakat bangsa dan negara, harus ditumpas habis, baik dilakukan secara preventif maupun

persuasif, dilakukan melalui pengurangan ekonomi biaya tinggi, menutup kesempatan, menegakan supremasi hukum, memberikan sanksi yang sesuai, mepghambat timbulnya perilaku korupsi, serta budaya korupsi, melalui pemberian pendidikan yang beorientasi kepada budaya kreatif, berorientasi pada nilai nilai kepribadian, perubahan perilaku, memberi dan memperdalam nilai moral keagamaan berbasis hindu.

## **2. Masukan**

Memberantas korupsi hal amat sulit, namun demikian perlu komitment bangsa negara dan masyarakat, secara bersama sama bahu membahu, bukan saling melemahkan dan menyalahkan, sehingga dapat membentuk power Nasional yang dapat berguna secara koprehenship mengatasi dan membasmi korupsi ditanah air.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C, Sri Simad, 2000. Bhagavad Gita. Menurut Aalinya, Jakarta; penerbit Hanoman Sakti, dibawah lisensi The Bhaktivedanta Book Trust.  
19
2. Gunadha, Ida Bagus. 2012. Aneka Politik Hindu, Denpasar : Widya Dharma  
16
3. Husaini Usman, 2010. Manajemen Teori. Praktik, dan Riset Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara  
18
4. Moelyono, Mauled, 2010. Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Antara Tututan dan Kebutuhan, Jakarta : Rajawali Press  
11
5. Rahardja, Prathama; Manurung, Mandala, 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Rhenald Kasali, 2006. Change, Jakarta : GM
7. Suhardana, KM, 2008. Pengantar Manajemen Bernuansa Hindu, Surabaya : Paramita  
13
8. Sudharta, Tjok Rai; Punia Atmaja, IB Oka, 2001. Upadesa Tentang Ajaran Agama Hindu. Surabaya : Paramita  
21
9. Terry, George R., 2006. Prinsip Prinsip Manajemen, Jakrta : Bumi Aksara  
23
10. Wojowasito, S, 1980. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Bandung : Penerbit, Hasta



# Pendidikan Anti Korupsi:: Perspektif Agama-Agama

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://davidsumual.blog.kontan.co.id">davidsumual.blog.kontan.co.id</a> Internet Source	2%
2	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
3	<a href="https://imadeyudhaasmara.wordpress.com">imadeyudhaasmara.wordpress.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://indahnyashare.blogspot.com">indahnyashare.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://bahruninfocom.blogspot.com">bahruninfocom.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://rayonpancasila.wordpress.com">rayonpancasila.wordpress.com</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
8	I Made Ngurah Dwiwana. "IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DHARMA GITA DALAM MEMBANGUN KARAKTER SISWA SD NEGERI 5 TULAMBEN", Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, 2020 Publication	1%

9	I Wayan Budi Utama, I Gusti Agung Paramita. "AGAMA DAN FENOMENA KEGILAAN", VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2018 Publication	1%
10	id.scribd.com Internet Source	1%
11	es.scribd.com Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1%
13	Wayan Ginawa, I.G.A Artatik. "RITUAL BAYUH AGUNG DI GRIYA KAWAN GANGGAWATI DESA KAWAN, KABUPATEN BANGLI", VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2019 Publication	<1%
14	sikuyangora.wordpress.com Internet Source	<1%
15	repo.isi-dps.ac.id Internet Source	<1%
16	hasanawie45.blogspot.com Internet Source	<1%
17	sulipan.wordpress.com Internet Source	<1%

18	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://sukarma-puseh.blogspot.com">sukarma-puseh.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
20	<a href="http://auramentaritravel.blogspot.com">auramentaritravel.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://dayushare.blogspot.com">dayushare.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://journal.fib.uho.ac.id">journal.fib.uho.ac.id</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://www.raihaniskandar.net">www.raihaniskandar.net</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://sendyslengean.wordpress.com">sendyslengean.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

# Pendidikan Anti Korupsi:: Perspektif Agama-Agama

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

